Model Penelitian Hubungan Pola Permukiman dan Konflik Antar Etnik

Emilya Kalsum

Program Studi Arsitektur, Universitas Tanjungpura, Indonesia
kalsum.emilya@gmail.com

ABSTRAK

Bangsa Indonesia seringkali mengalami konflik antar etnik, yang dapat terjadi karena kemajemukan suku dan kebudayaan yang dimiliki. Banyak penelitian yang menyebutkan bahwa akar permasalahan konflik adalah perbedaan sistem nilai-nilai budaya dan kemudian konflik dapat menyebabkan segregasi yang berimbas pada pola permukiman. Padahal bukan tidak mungkin konflik tersebut terjadi karena suatu pola permukiman yang menegaskan perbedaan nilai-nilai di antara pemukimnya sehingga proses integrasi tidak dapat terjadi. Kajian ini menyusun model yang dapat digunakan untuk menelaah pengaruh pola permukiman terhadap konflik sehingga mampu dilakukan penelitian yang komprehensif. Kajian dimulai dengan mengupas pengertian pola permukiman dengan tiga unsur (wadah, isi, jaringan) dan melihat konsep hubungan sosial. Wujud proses interaksi sosial dapat memunculkan dua alternatif yang bersifat positif atau negatif. Hal bersifat negatif akan memunculkan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis dan kemudian memunculkan konflik. Hubungan sosial antar etnik juga selalu diwarnai prasangka yang dilandasi sikap stereotip dan etnosentris juga karena adanya perbedaan kepentingan. Unsur-unsur dalam pola permukiman dikaitkan dengan hubungan sosial di antara penghuninya. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perilaku melalui konsep seting perilaku (*behavior setting*). Hasil kajian adalah sebuah model penelitian yang mengkaitkan antara pola permukiman sebagai wadah (*space*) kegiatan dan kondisi sosial yang tidak terlepas dari sikap stereotip dan etnosentris serta perbedaan kepentingan.

Kata kunci: pola permukiman, konflik antar etnik, seting perilaku

ABSTRACT

Indonesia, with its multi-cultural and ethnic diversity, has suffered many ethnic conflicts. Research has shown that the conflicts roots from the different system of cultural values. The conflicts can lead to segregation which impact on settlement patterns. However, it is possible that conflict occurs due to settlement pattern that asserts the difference in values between the settlers so that the integration process cannot occur. This study is to create a research model that can be used to investigate the effect of the settlement pattern to the conflict. It began with the definition of settlement pattern which includes three elements (place, content, network) and seek the concept of social relationship. Social interaction process can produce two alternatives that are positive or negative. Negative alternative will bring inharmonic atmosphere which let to conflict. Inter-ethnic social relations also always accompanied by prejudices based on stereotype and ethnocentric attitudes; also due to different interests. Elements in settlement pattern was studied with its connection with social relations among its inhabitants. The approach taken was behavioral approach by the concept of behavior setting. The study resulted in a research model which combine settlement pattern as space for activity with social condition which is closely related to stereotype and ethnocentric attitudes as well as different interests.

Keywords: settlement pattern, inter-ethnic conflict, behavior setting

1. Pendahuluan

Bangsa Indonesia seringkali mengalami konflik antar etnik dari waktu ke waktu. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya suku dan kebudayaan yang ada. Kemajemukan masyarakat baik dari segi agama, etnik maupun budaya merupakan faktor potensial dalam membangkitkan konflik di tengah-tengah

masyarakat. Penelitian terhadap permasalahan konflik di Indonesia telah banyak yang dilakukan. Banyak penelitian yang mengemukakan bahwa akar permasalahan konflik adalah perbedaan sistem nilai-nilai budaya yang menjadikan masyarakat memiliki sikap yang berbeda pula dalam hubungan antar individu maupun antar kelompok. Hubungan-

hubungan ini umumnya menyangkut masalah agama, sosial dan ekonomi. Tidak jarang konflik yang timbul dalam satu daerah atau wilayah disebabkan oleh dua atau bahkan tiga masalah dari nilai-nilai tersebut (Heeren, 1979; Indonesia, 1978; Baum, 1998; Pattiselanno, 1999; Koentjaraningrat, 1974; Pelly, 1999; Alqadrie, 1999; Putra, 1978; Scott, 1998; Owusu, 1999).

Banyak penelitian yang mengemukakan bahwa konflik yang disebabkan oleh masalah-masalah di atas dapat menyebabkan segregasi pada masyarakat sehingga mereka akan memilih permukiman yang berakibat terbentuknya suatu pola permukiman. (Scott, 1998; Owusu, 1999; Kempen, 1998; Murdie, 1998; Friedrichs, 1998; Ellen, 2000). Padahal bukan tidak mungkin konflik-konflik tersebut terjadi karena suatu pola permukiman yang menegaskan perbedaan nilai-nilai di antara pemukimnya. Sehingga proses integrasi tidak dapat terjadi akibat pemukimnya tidak dapat berakulturasi.

Permasalahan umum dalam kajian ini adalah model penelitian yang dapat digunakan untuk meneliti pengaruh pola permukiman terhadap konflik. Secara garis besar terdapat dua bentuk pemahaman tentang konflik yaitu konflik vertikal dan konflik yang bukan vertikal. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi karena adanya ketidakpuasan terhadap kebijaksanaan yang dilakukan oleh pihak penguasa. Teori Marxist dan turunannya seringkali digunakan untuk mengupas jenis konflik ini. Sedangkan konflik antar etnik adalah jenis konflik yang bukan vertikal, melainkan jenis konflik yang terjadi dari adanya ketidakharmonisan dalam hubungan antar manusia karena itu pendekatan yang dilakukan tidak terlepas dari lingkup sosiologi secara umum. Pada prinsipnya sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dalam kelompok-kelompok serta menganalisa kehidupan sosial mereka (Polak, 1979; Broom, 1981; Soekanto, 2001). Untuk memperjelas kajian ini akan diajukan beberapa pengertian dasar untuk mendapatkan suatu konsep model yang tepat dalam penelitian.

2. Pengertian dan Konsep Pola Permukiman

Sampai saat ini belum terdapat pengertian yang baku tentang pola

Langkau Betang: Vol. 2, No.1 (ISSN 2355-2484)

permukiman. Pola permukiman dilihat hanya sebagai dua bentuk permukiman yang berbeda. Sudagung (2001) mengemukakan dua pola permukiman berdasarkan pendapat dari J. Isaac yang terdiri dari pola permukiman kelompok yaitu terbukanya daerah baru yang semula belum diolah sehingga produksinya bertambah, dan pola permukiman sisipan yaitu permukiman dari orang perorangan atau keluarga di dalam masyarakat yang telah ada. Sementara itu para ahli geografi melihat pola permukiman sebagai hasil dari pergerakan kelompok masyarakat dalam membentuk kelompok permukiman yang tersebar menurut pola geografi. Dalam kaitannya dengan kelompok etnik, Sulistyono (1982) mengelompokkan pola permukiman dalam *integrated pluralism* dan *segregated pluralism*. *Integrated pluralism* adalah pola permukiman dimana pemukim/migran yang berasal dari berbagai etnik bermukim pada satu wilayah tertentu dan kelompok etnik tersebut tidak dipisahkan secara geografis menurut wilayah asal, atau kesukuan. Sedangkan *segregated pluralism* adalah pola permukiman dimana pemukim yang berasal dari kelompok etnik yang sama bermukim pada satu wilayah tertentu. Pendapat ini senada dengan pendapat Kempen (1998) yang mengatakan bahwa pola permukiman segregasi atau *segregated pluralism* mengimplikasikan suatu pengelompokan spasial : "*If an area (Neighborhood) displays an over-representation of certain group (compared to, for that group)*".

Untuk mengerti konsep tentang pola permukiman ini ada baiknya ditinjau terlebih dahulu pengertian dari pola itu sendiri. "Pola" dalam kamus besar bahasa Indonesia (1988) mengandung arti gambar yang dipakai untuk contoh, corak, sistem, bentuk (struktur) yang tetap, kombinasi sifat kecenderungan yang khas, informasi, bentuk pengorganisasian, teknik penyusunan, pedoman, kerangka cara dan usaha. Menurut kamus Psikologi pola adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman, susunan dari bagian-bagian yang membentuk suatu kesatuan terpadu dan berkarakter (Kartono, 1987) atau gabungan fungsional dari bagian-bagian yang dapat dibedakan (Drever, 1986). Sedangkan menurut Rapoport pola adalah alat untuk mengenali suatu fenomena (Rapoport, 1969).

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pola adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman dalam menggambarkan suatu kondisi yang dapat berupa bentuk, kombinasi sifat yang khas, susunan atau pengorganisasian, sistem, corak, kerangka, cara maupun usaha yang ada. Maka dengan demikian pola permukiman adalah segala sesuatu yang berfungsi sebagai pedoman untuk menjelaskan kondisi suatu permukiman dengan menggunakan unsur-unsur dari permukiman tersebut.

Permukiman sendiri adalah suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan sebagai lingkungan kehidupan. Permukiman tersebut memberi ruang gerak, sumber daya dan pelayanan bagi peningkatan mutu kehidupan serta kecerdasan warga penghuni, yang berfungsi sebagai ajang kegiatan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi. Permukiman merupakan hasil kegiatan manusia dan tujuannya yaitu untuk bertahan hidup sebagai manusia, agar dapat hidup secara lebih mudah dan lebih baik (Doxiadis, 1974).

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa permukiman mengandung beberapa unsur yaitu:

- Wadah yaitu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang memberikan ruang gerak, sumber daya dan pelayanan.
- Isi yaitu penghuni atau kelompok masyarakat yang berada di dalam kawasan perumahan tersebut.
- Jaringan berupa kegiatan sosial, budaya dan ekonomi yang dilakukan karena adanya kepentingan dari masing-masing penghuni dengan memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada pada kawasan perumahan tersebut.

Pola dari suatu permukiman dapat dijelaskan dengan menggunakan ketiga unsur di atas karena karakteristik dari masing-masing unsur yang berbeda akan membentuk pola permukiman yang berbeda pula. Namun dalam kajian ini yang akan digunakan adalah unsur yang dapat mengakibatkan konflik antar kelompok

masyarakat penghuni permukiman tersebut dengan masyarakat sekitar di luar permukiman itu. Untuk menemukan unsur tersebut akan diuraikan terlebih dahulu konsep dari hubungan sosial.

Untuk mengenali karakteristik pola permukiman, Basset (1978) mengajukan empat pendekatan yaitu pendekatan ekologi, neo klasik, institusi dan Marxist. Pendekatan ekologi menjelaskan pola ruang dan struktur tempat tinggal sebagai hubungan atau keseimbangan antara sifat lokasi dengan sifat kelompok masyarakat penghuninya. Pendekatan neo klasik menjelaskan struktur ruang kota dan lokasi tempat tinggal sebagai hubungan keseimbangan atau pertukaran *supply* dan *demand*, pilihan preferensi dan kebutuhan individu serta maksimasi manfaat. Pendekatan institusi menjelaskan perkembangan permukiman sebagai hasil keputusan dari sejumlah aktor yang berperan dan terikat dalam suatu hubungan kekuasaan satu dengan lainnya dalam proses perkembangan. Pendekatan ini juga mengkonstruksikan peran, strategi dan kepentingan pelaku terhadap sumber daya, aturan kelembagaan dan penyusunan gagasan yang secara implisit dan eksplisit tampak dari apa yang dikerjakan. Sedangkan pendekatan Marxist menjelaskan permukiman sebagai komoditi dan reproduksi tenaga kerja, dengan mempertentangkan kelas masyarakat yang menguasai atau mengendalikan nilai lebih dengan yang menghasilkan nilai lebih tersebut. Dalam kaitannya terhadap konflik pola permukiman dilihat sebagai suatu lingkungan fisik tempat dimana manusia hidup di dalamnya. Karena itu pendekatan yang lebih tepat untuk memandang pola permukiman tersebut adalah dengan menggunakan pendekatan ekologi.

3. Pengertian dan Konsep Hubungan Sosial

Pada dasarnya manusia selalu melakukan pergerakan. Pergerakan ini dilakukan dengan perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain atau dari satu wilayah ke wilayah lainnya yang disebut migrasi (Hardjosudarmo, 1965). Selanjutnya dalam suatu kehidupan bermasyarakat di wilayah yang baru, manusia bermukim, berkumpul dan bertemu dengan kelompok masyarakat yang lain yang terdiri dari beberapa golongan etnik. Pengertian etnik

terletak pada pengorganisasian sosial yang didapat oleh para pelakunya secara sekretif, untuk keperluan interaksi sosial yang dibedakan oleh karakteristik kebudayaan yang dimiliki oleh para anggota (Suparlan, 1999). Karakteristik ini meliputi agama, bahasa atau suku/kebangsaan (Cohen, 1992).

Menurut ahli-ahli sosio-psikologi, karakteristik hubungan sosial di dalam suatu komunitas akan sangat dipengaruhi oleh besarnya kesempatan setiap individu dari anggota komunitas untuk memilih atau membentuk kelompok yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Kebutuhan tersebut didasari oleh sifat manusia untuk saling memperoleh keuntungan yang timbal balik di dalam jalinan hubungan yang dibentuk (Brooms & Selznick, 1957; Porteous, 1977). Konsep tersebut secara jelas memperlihatkan pentingnya interaksi sosial antar pemukim. Interaksi sosial adalah bentuk umum dari proses-proses sosial yang merupakan hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-perorangan antar kelompok manusia ataupun antara orang-perorangan dengan kelompok manusia (Gillin and Gillin dalam Soekanto, 2001).

Perwujudan proses interaksi sosial dalam pertemuan beberapa kelompok etnik tersebut akan membuahkan dua alternatif yaitu bersifat positif dan negatif (Raharjo, 1984). Hal yang bersifat positif timbul jika pertemuan itu mampu menciptakan suasana hubungan sosial yang harmonis dalam masyarakat baru. Kondisi seperti ini sering disebut juga dengan integrasi yaitu proses dari penduduk pendatang untuk secara aktif mengambil bagian dalam kehidupan masyarakat di wilayah yang baru serta dapat menggambarkan suatu keadaan masyarakat baik pendatang maupun asli hidup dalam suasana yang relatif aman dan tentram tanpa adanya konflik sosial yang dapat mengganggu proses perkembangan secara keseluruhan dalam wilayah tersebut. Hal yang bersifat negatif dalam interaksi sosial muncul jika pertemuan beberapa golongan etnik ini menimbulkan suasana hubungan sosial yang tidak harmonis karena adanya perbedaan sikap dalam memandang obyek yang menyangkut kepentingan bersama. Faktor ini bisa menyebabkan hubungan antar golongan menjadi tegang dan gampang menjurus kepada konflik.

Langkau Betang: Vol. 2, No.1 (ISSN 2355-2484)

Pengertian konflik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) adalah pertentangan, perselisihan, percekocokan, ketegangan atau persaingan. Semua variabel tersebut adalah unsur-unsur utama dalam konflik. Konflik ada dalam setiap hubungan manusia sebagai suatu fenomena yang sangat kompleks dan sulit dimengerti. Penelitian tentang konflik atau revolusinya berkembang pesat di seluruh dunia. Tiap peneliti membangun konsepsi pendekatan yang berbeda-beda dan tidak selaras dengan teori yang lainnya. Hal ini karena konflik memang sulit untuk dijelaskan, kondisi ini berhubungan dengan area yang disepakati dalam hubungan sosial (Bernard, 1973). Ketika seseorang menganggap sesuatu hal atau kondisi pada suatu tempat menyebabkan konflik, orang yang lain akan melihatnya bukan sebagai penyebab konflik karena tidak terjadi di tempat yang lain. Area yang disepakati dalam hal ini menyangkut norma atau aturan yang berlaku pada tempat tersebut. Norma menurut Sill (1968) adalah suatu "aturan atau pedoman tingkah laku yang secara jelas terwujud karena harapan bersama atas diri sejumlah orang mengenai tata laku yang bagaimana yang dapat diterima dalam masyarakatnya. Norma dalam hal ini bukanlah merupakan tingkah laku pada umumnya melainkan lebih bersifat ketentuan kultural akan tata laku yang diharapkan". Norma atau aturan ini berasal dari nilai-nilai yang diyakini yang kemudian akan menjadi suatu kebudayaan yang dominan. Jika seseorang berlaku tidak sesuai dengan norma tersebut maka kemudian akan melahirkan konflik, seperti pendapat yang mengatakan bahwa konflik terjadi karena adanya kebudayaan yang dominan (Bruner dalam Suparlan, 1999) dimana kebudayaan dominan ini tidak dapat menerima adanya kebudayaan lainnya. Kebudayaan dominan tersebut tentu saja akan sangat berbeda di antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya.

Secara sederhana konflik terbagi dalam tiga proses yaitu pra kondisi, konflik dan akibat (Minnery, 1986). Sedangkan Pondy (1967) menjabarkan konflik dalam 5 tingkat episode yaitu konflik latent (kondisi), konflik perasaan (kognisi), konflik pikiran (pengaruh), konflik nyata (perilaku), akibat konflik (kondisi). Dari proses konflik ini dapat dikelompokkan dua jenis konflik yaitu

Hal. 80

konflik laten dan konflik nyata. Konflik nyata adalah sebuah interaksi antara dua atau lebih kelompok yang saling berhubungan yang berasal dari pertentangan tujuan, ketika satu kelompok mengejar tujuan tersebut dengan membuat kesulitan pada kelompok lain untuk menggunakan sumber daya maka akan terjadi konflik. Pada prinsipnya konflik laten akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya konflik nyata. Kondisi yang menyebabkan konflik ini akan sangat berpengaruh terhadap terjadinya konflik nyata. Seperti pendapat Watkins (1974) yang mengatakan bahwa konflik terjadi bila terdapat dua pihak yang secara potensial dan praktis atau operasional dapat menghambat. Secara potensial artinya mereka mampu untuk menghambat. Secara praktis atau operasional kemampuan tadi dapat diwujudkan dan ada dalam keadaan yang memungkinkan perwujudannya dengan mudah. Pengertian ini menunjukkan bahwa konflik nyata terjadi karena sebelumnya terdapat konflik-konflik laten yang berkembang.

Pada dasarnya hubungan sosial antar etnik selalu diwarnai oleh prasangka dan diskriminasi yang dilandasi oleh sikap stereotipe dan etnosentris. Stereotipe adalah suatu tanggapan atau gambaran tertentu mengenai sifat dari suatu objek atau seseorang yang bercorak negatif (Soelaeman, 1986). Sedangkan etnosentris adalah suatu pandangan yang tinggi terhadap diri sendiri (Sudagung, 2001). Setiap kelompok cenderung berpikir bahwa tindakan mereka adalah sesuatu yang wajar dan terbaik. Orang-orang, kepercayaan atau tata cara yang asing dipandang dengan rasa curiga dan permusuhan karena terasa asing (Broom, 1981). Sikap-sikap seperti inilah yang akhirnya akan menimbulkan prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok lain di luar kelompok dirinya (Soelaeman, 1993). Sikap adalah kecenderungan untuk berespon baik positif maupun negatif terhadap orang, objek atau situasi. Kecenderungan ini meliputi perasaan dan pandangannya. Selanjutnya sikap prasangka dan diskriminasi tersebut akan melahirkan kecenderungan untuk melakukan pertentangan, perselisihan, percekokan, ketegangan atau persaingan yang lama-kelamaan akan melahirkan suatu pertikaian. Karena itu sikap stereotipe dan

etnosentris ini merupakan konflik laten yang berpotensi melahirkan konflik nyata.

Dalam kehidupannya manusia pasti melakukan banyak aktivitas karena adanya kepentingan. Kepentingan merupakan dasar dari terbentuknya tingkah laku individu karena ada dorongan untuk memenuhi kebutuhannya (Ahmadi, 1991). Maka aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat pada hakekatnya merupakan manifestasi pemenuhan dari kepentingan tersebut. Dalam melakukan kegiatan ini seringkali diperlukan alat atau sarana serta tempat sebagai ruang gerak. Untuk itulah setiap individu akan memanfaatkan segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat dan segala ruang yang dapat dijadikan tempat mereka dalam beraktivitas. Dengan kata lain mereka menggunakan segala sumber daya yang ada di sekitar mereka. Sumber daya yang dimaksud tentu tidak saja berupa sumber daya yang berpotensi terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi juga sumber daya yang dapat menciptakan kemudahan-kemudahan masyarakat dalam beraktivitas atau berperilaku. Perebutan atau penggunaan sumber daya dengan cara yang berbeda akan menimbulkan benturan atau konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan ini akan melahirkan beberapa fase (Susanto, 1977). Fase pertama adalah disorganisasi yaitu adanya kesalahpahaman akibat adanya pertentangan. Fase kedua adalah disintegrasi yaitu timbulnya konflik karena tidak dapat menyelesaikan kesalahpahaman yang muncul pada fase yang terjadi sebelumnya.

Selain konflik yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan kepentingan, konflik juga dapat terjadi karena adanya perbedaan nilai-nilai budaya dari kedua belah pihak yang melahirkan perbedaan persepsi. Kelompok masyarakat pertama menganggap bahwa aktivitas kelompok pendatang sangat tidak berbudaya sementara kelompok pendatang beranggapan bahwa cara mereka beraktivitas merupakan suatu hal yang lumrah karena sangat sesuai dengan nilai-nilai budaya yang mereka anut.

Konsep tentang konflik di atas memaparkan dua sumber penyebab konflik yaitu konflik kebudayaan dan konflik kepentingan. Meskipun masih banyak lagi sumber-sumber konflik yang lain, konflik

antar etnik terjadi seringkali disebabkan oleh kedua sumber tersebut di samping pada perbedaan-perbedaan ciri-ciri rasial mereka (Soekanto, 2001).

4. Konflik pada Pola Permukiman

Unsur-unsur dalam pola permukiman selanjutnya ditentukan dalam kaitannya terhadap hubungan sosial di antara penghuninya. Pola permukiman yang dapat mempengaruhi kualitas hubungan antar etnik tidak hanya dilihat dari unsur fisiknya saja. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya pola permukiman merupakan perpaduan antara struktur fisik dengan struktur sosial yang tercipta dari pengelompokan orang yang saling berdekatan untuk tujuan bertempat tinggal, berbudaya, memproduksi dan berkehidupan sosial.

Untuk terciptanya integrasi dalam interaksi sosial harus dipenuhi dua syarat yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi antara kelompok penduduk yang berlangsung secara intensif dan efektif (Soekanto, 2001). Kontak sosial merupakan tahap pertama dari terjadinya interaksi. Terjadinya kontak sosial tidaklah semata-mata tergantung dari tindakan, akan tetapi juga tanggapan terhadap tindakan tersebut. Sedangkan arti penting dari komunikasi adalah bahwa seseorang memberikan tafsiran pada perilaku orang lain (yang berwujud pembicaraan, gerak badan atau sikap), perasaan-perasaan apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut. Studi yang telah dilakukan oleh para ahli sosial terhadap interaksi sosial di dalam suatu permukiman memperlihatkan adanya pengaruh tempat (*place*) terhadap hubungan sosial penghuninya.

Konsep mengenai ruang (*space*) ini telah dikembangkan melalui beberapa pendekatan seperti pendekatan ekologis; pendekatan ekonomi dan fungsional; pendekatan sosial-politik; serta pendekatan perilaku. Ketiga pendekatan pertama tidak memperhatikan interaksi yang dialektik antara manusia dengan ruang atau lingkungannya. Sedangkan pendekatan yang keempat memperhatikan hal tersebut. Karena permasalahan dalam studi ini berkaitan terhadap perilaku atau interaksi antara manusia dan ruang, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perilaku. Pendekatan ini cenderung menggunakan istilah seting daripada ruang.

Langkau Betang: Vol. 2, No.1 (ISSN 2355-2484)

Salah satu konsep penting dalam pendekatan ini adalah seting perilaku atau *behavior setting* (Haryadi, 1995). Istilah ini kemudian dijabarkan dalam dua istilah yaitu; *system of setting* dan *system of activity*, yang keterkaitan antara keduanya membentuk satu seting perilaku tertentu. *System of setting* atau sistem tempat atau ruang diartikan sebagai rangkaian unsur-unsur fisik atau spasial yang mempunyai hubungan tertentu dan terkait sehingga dapat dipakai untuk suatu kegiatan tertentu. Dalam kaitannya dengan pola permukiman dan konflik antar etnik, sistem tempat ini dapat diuraikan dengan melihat kondisi unsur-unsur permukiman dalam suatu seting kota atau kawasan. Unsur-unsur tersebut terdiri dari kawasan perumahan serta fasilitas pelayanan kota lainnya. Sementara *system of activity* atau seting kegiatan diartikan sebagai rangkaian perilaku yang secara sengaja dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Seting kegiatan dalam seting tempat inilah yang selanjutnya akan dilihat pengaruhnya terhadap timbulnya konflik antar etnik.

Selanjutnya kondisi unsur-unsur dalam permukiman dikaitkan dengan permasalahan utama dalam konflik antar etnik. Benturan yang terjadi di antara kelompok etnik adalah benturan kebudayaan dan benturan kepentingan. Masing-masing kelompok etnik memiliki kepentingan yang berbeda-beda selaras dengan tradisi atau kebudayaan mereka. Dalam memenuhi kepentingan tersebut mereka menggunakan sumber daya yang ada di sekeliling mereka. Dengan berbedanya kepentingan di antara mereka tentu saja membuat masing-masing kelompok etnik tersebut memberi perlakuan yang berbeda terhadap segala sumber daya yang ada. Perbedaan perlakuan ini pada akhirnya dapat menyebabkan benturan-benturan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu dicermati bagaimana proses suatu kelompok etnik menempati suatu kawasan permukiman dan menggunakannya, serta bagaimana pengaruhnya terhadap kelompok etnik lain. Suatu proses penempatan dan penggunaan yang tidak sesuai dengan kebiasaan kelompok lain, pada akhirnya dapat menimbulkan sikap tidak senang atau stereotip yang berpotensi melahirkan konflik.

Benturan tersebut sebetulnya tidak menjadi persoalan jika mereka dapat saling

memahami kebiasaan kelompok lain. Namun pemahaman tersebut tidak dapat berlangsung jika terdapat sikap etnosentris yang kuat pada masing-masing kelompok. Sikap etnosentris tersebut berupa keyakinan bahwa kebiasaan pada kelompoknya adalah kebiasaan yang paling tepat. Sikap seperti ini muncul karena adanya ikatan yang kuat dalam kelompok etnik tersebut. Hal ini dapat terjadi dalam suatu kehidupan yang selalu mengelompok. Pengelompokan tersebut biasanya berawal dari kondisi suatu permukiman. Karena itu variabel selanjutnya dalam penelitian ini adalah melihat pola pengelompokan dari masing-masing permukiman etnik.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka sistem tempat tersebut berkaitan erat pula dengan *personal space* yaitu jarak yang dibutuhkan untuk suatu interaksi, *territory space* yaitu batas dan orientasi ruang yang berkaitan dengan persepsi dan kognisi seseorang tentang lingkungan yang melingkari masyarakat yang bersangkutan

(Yusuf, 1989).

Di sisi lain suatu sikap stereotip dan etnosentris antar kelompok etnik dapat dihindari jika terdapat suatu interaksi yang intensif karena adanya kontak fisik di antara pelakunya. Interaksi yang intensif ini akan pada akhirnya dapat menghasilkan suatu hubungan yang terintegrasi (Soelaeman, 1993). Jarak, batas dan orientasi dalam permukiman dapat membentuk suatu situasi dan kondisi tertentu yang mempengaruhi suatu interaksi. Jika situasi dan kondisi tidak mendukung untuk terciptanya suatu hubungan maka interaksi yang terjadi adalah interaksi yang dipaksakan atau bahkan tidak terjadi interaksi sama sekali. Tidak terjadinya interaksi dapat menimbulkan sikap stereotip dan etnosentris yang melahirkan diskriminasi dan prasangka. Sikap prasangka ini dapat menyebabkan proses integrasi menjadi tidak berhasil.

Untuk memahami kajian di atas dapat dilihat dari kerangka/bagan di Gambar 1.

Gambar 1: Skema model penelitian pengaruh pola permukiman pada konflik
Sumber: Penulis, 2014

5. Kesimpulan

Dari kajian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk melihat pola permukiman dalam kaitannya dengan konflik antar etnik, maka pola permukiman perlu dilihat baik secara fisik sebagai sebuah wadah (*space*) dan secara non fisik

melalui hubungan sosial di dalamnya. Sebagai wadah (*space*), pola permukiman perlu dilihat bentuk sebaran permukiman dan fasilitas dari penempatan dan penggunaannya; serta pengelompokan permukiman yang dilihat dari kondisi fisik dan sosial dan jarak, batas dan orientasi.

Kondisi sosial dalam pola permukiman perlu melihat sikap etnosentris dan stereotip pemukim; benturan kepentingan dan kebudayaan; serta konflik antar etnik yang telah terjadi.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, A. 1991. *Masalah Carok Di Madura*, Samsuri Ed., Madura II, Proyek Penelitian Madura, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. Malang: IKIP.
- Alqadrie, Syarif Ibrahim. 1999. "Konflik Etnik di Ambon dan Sambas: Suatu Tinjauan Sosiologis". *Antropologi Indonesia*. Th. XXIII, No. 58.
- Basset, Keith dan Short, John. 1978. *Housing Residential Structure Alternatives Approaches' Ronhedge & Kegan Paul*. London: Boston & Henley.
- Baum, Howeell S. 1998. "Ethical Behavior is Extraordinary. Behavior; It's The Same As All Other Behavior. A Case Study In Community Planning". *APA Journal Autumn*.
- Bernard, Jessie. 1973. *Concensus, Conflict And Criminology*. Unpub. PhD, School of Criminal Justice, State University Of N.Y at Albany.
- Broom, L., Selznick P. 1957. *Sociology*, Row. New York: Petterson & Co.
- Broom, L., Selznick P. dan Daroch, D.S. 1981. *Sociology*. New York: Harper International Edition.
- Cohen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rineka Cipta.
- Doxiadis. 1974. "Action For A Better Scientific Approach To The Subject Of Human Settlements" *The Journal of Ekistics*. Volume 38. No. 229. Desember 1974.
- Drever, James. 1986. *Kamus Psikologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ellen, Ingrid Gould. 2000. "Race-Based Neighborhood Projection: A Pro-posed Framework for Understanding New Data On Racial Integration", *Urban Studies*. Vol. 37, No. 9. p. 1513 – 1533.
- Friedrichs, Jurgen. 1998. "Ethic Segregation In Cologne, Germany, 1984-94". *Urban Studies*. Vol. 35 No. 10. p.1745 – 1763.
- Hardjosudarmo, Soedigdo. 1965. *Kebijakan Transmigrasi Dalam Rangka Pembangunan Masyarakat Desa Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Haryadi & B. Setiawan. 1995. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku, Suatu Pengantar Ke Teori, Metodologi dan Aplikasi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Heeren, H.H. 1979. *Transmigrasi di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Indonesia, Depnakertrans, Badan Penelitian dan Pengembangan. 1978. *Laporan Penelitian Bentuk-bentuk Interaksi Sosial Antar Kelompok Etnik di Daerah Transmigrasi 1977/1978*. Jakarta.
- Kartono, Kartini dan Gulo, Dali. 1987. *Kamus Psikologi*. Bandung: Pionir Jaya.
- Kempen, R. Van dan Ozueken, Sule. 1998. "Ethnic Segregation In Cities: New Forms And Explanation In A Dynamic World". *Urban Studies*. University of Glasgow. Vol. 35. No. 10.
- Koetjaraningrat. 1974. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Minnery, J.R. 1986. "Urban Planners And Role Conflicts". *Journal Of Urban Policy And Research*.
- Murdie, Robert A. & Borgegard, Lars-Erik. 1998. "Immigration Spatial Segregation and Housing Segmentation Of Immigrants In Metropolitan Stockholm, 1960-95". *Urban Studies*, Vol. 35, No. 10, p. 1869 – 1888.
- Owusu, Thomas Y. 1999. "Residential Patterns and Housing Choices of Ghanaian Immigrants in Toronto, Canada". *Housing Studies*. Vol. 14, No. 1. 1999.

- Pattiselanno, J.Th.F. 1999. "Tradisi Uli, Pela dan Gandong pada Masyarakat Seram, Ambon dan Uliase". *Jurnal Penelitian Antropologi*.
- Pelly, Usman. 1999. "Akar Kerusuhan Etnis di Indonesia: Suatu Kajian Awal Konflik dan Disintegrasi Nasional di Era Reformasi" dalam seminar *Memasuki Abad Ke-21: Antropologi Indonesia Menghadapi Krisis Budaya Bangsa*. Kampus Universitas Indonesia. 6-8 Mei 1999.
- Polak, Mayor .1979. *Sosiologi, Suatu Buku Pengantar Ringkas*. Jakarta: Ikhtiar Baru.
- Pondy, Louis R. 1967. "Organizational Conflict: Concepts and Models". *Administrative Science Quarterly*. Vol. 12, No. 2. September 1967.
- Porteous, Douglas J. 1977. *Environment And Behaviour*. Massachusset: Addison Wishley Publishing Co.
- Putra, Hedhi Sri Ahimsa. 1978. *The Transmigration Village of Sidomulyo Yogyakarta*. Yogyakarta: Lembaga Pendidikan Kependudukan UGM.
- Rahardjo, Chodijah B. 1984. *Transmigrasi dari Daerah Asal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: Rajawali.
- Rapoport, Amos. 1969. *House, Form And Culture*. London: Prentice-Hall, Inc.
- Scott, Suzie & Parkey, Hillary. 1998., "Myths And Reality: Anti-Social Behavior In Scotland". *Housing Studies*. Vol. 13, No. 1, 1998.
- Sill, David L. 1968. *International Encyclopedia of The Social Sciences*. The MacMillan Company & The Free Press.
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Soelaeman, M. Munandar. 1986. *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Jakarta : LP FE-UI.,
- Soelaeman, M. Munandar. 1993. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung: Eresco, Bandung.
- Sudagung, Hendro Suroyo 2001. *Mengurai Pertikaian Etnis, Migrasi Swakarsa Etnis Madura Ke Kalimantan Barat*. Institut Studi Arus Informasi.
- Sulistyo, Hermawan. 1982. *Aspek-Aspek Sosial Transmigrasi*. Economica. Vol. 10, No.2.
- Suparlan, Parsudi. 1972. *The Javanese In Bandung: Ethnicity In A Medium Sized Indonesian City*. M.A., Thesis, University Of Illinois.
- Suparlan, Parsudi, 1999. Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan Dan Kesukubangsaan, dalam seminar 'Memasuki Abad ke-21 : Antropologi Indonesia Menghadapi Krisis Budaya Bangsa', di Kampus Universitas Indonesia. 6-8 Mei 1999.
- Susanto, Astrid S. 1979. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cipta.
- Watkins, J.W.N. 1974. The Unity of Popper's Thought, dalam P.A. Schilpp (Ed.), *The Philosophy of Karl Popper*. The Library of Living Philosophers, vol. XIX. Illinois: Open Court.
- Yusuf, Yusman. 1989. *Dinamika Kelompo*. Bandung: CV. Armico.